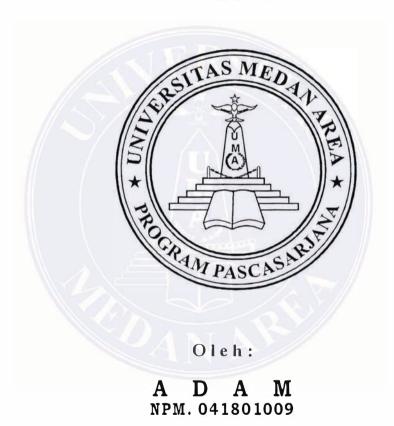
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) DI KABUPATEN GAYO LUES

TESIS

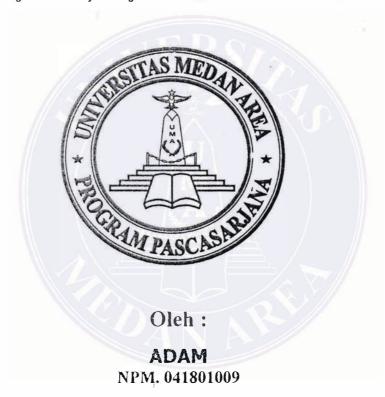


PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 6

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) DI KABUPATEN GAYO LUES

TESIS

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)
Pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area



PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2006

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK UNIVERSITAS MEDAN AREA

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan oleh :

Nama

: ADAM

NPM

: 041801009

PROGRAM

: MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

JUDUL

: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Surat

Izin Tempat Usaha (SITU) Di Kabupaten Gayo Lues

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Usman Tarigan, MS

Drs. Burhanuddin Harahap, MA

Direktur Program Pascasarjana- UMA Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik

Drs. Heri Kusmanto, MA

Drs. Kariono, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini dipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area

Pada Hari: Jum'at

Tangal : 19 Mei 2006

Tempat : Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik

Universitas Medan Area.

PANITIA PENGUJI

Ketua	: Drs. Kariono, MA	()
Sekretaris	: Ir. Erwin Pane, MS	()
Anggota I	: Drs. Usman Tarigan, MS	()
Anggota II	:Drs. Burhanuddin Hrp, MA	()
Penguji Tamu	: Drs.Heri Kusmanto, MA	()

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T karena atas rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad S.A.W. yang telah mengantarkan umatnya dari masa jahiliah menuju umat yang berilmu pengetahuan.

Dalam penyelesaian tesis ini penulis menyadari dan mengakui banyak kelemahan serta kekurangan dari penulis, sehingga tesis yang dibuat ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

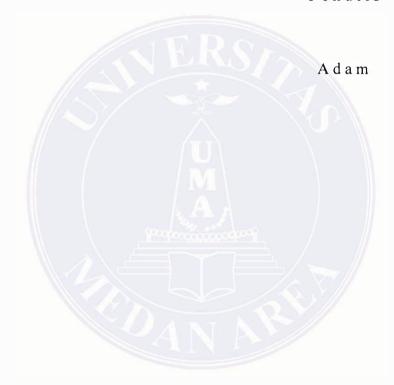
- 1. Bapak Rektor Universitas Medan Area Medan
- 2. .Bapak Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area
- 3. Bapak Drs. Kariono, MA, Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik
- 4. Bapak Drs. Usman Tarigan, MS, sebagai Pembimbing I
- 5. Bapak drs. Burhanuddin Harahap, MA, sebagai Pembimbing II
- 6. Bapak Bupati Gayo Lues
- Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar PPS Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area
- 8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Mudah-mudahan Allah S.W.T. memberikan rahmat dan pahalaNya kepada pihakpihak yang tersebut di atas sesuai dengan bantuan yang telah dicurahkannya, amin.

Medan,

2006

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
RINGKASAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Hipotesis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kebijakan Publik	8
2.2. Implementasi Kebijakan	10
2.3. Kebijaksanaan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat	
dan Daerah	20
2.4. Pajak Daerah	. 23
2.5. Retribusi Daerah	28
2.6. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2004 tentang Surat Izin	
Tempat Usaha (SITU)	31

	halamar
2.7. Kerangka Pemikiran	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Bentuk Penelitian	36
3.2. Lokasi Penelitian	36
3.3. Populasi dan Sampel	37
3.4. Rencana Sampling	37
3.5. Teknik Pengumpulan Data dan Pengukurannya	38
3.6. Operasional Variabel	39
3.7. Teknik Analisis Data	40
BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN GAYO LUES	
4.1. Profil Kabupaten Gayo Lues	42
4.1.1. Historis Gayo Lues	42
4.1.2. Letak Geografis	43
4.1.3. Pemerintahan	44
4.1.4. Kependudukan	44
4.2. Visi dan Misi	45
4.3. Perusahaan	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
5.1. Hasil Penelitian	47
5.1.1. Karakteristik Responden	47
5.1.2. Variabel Penelitian	49

	Halaman
5.2. Analisis Data	55
5.2.1. Implementasi Kebijakan Izin Tempat Usaha	55
5.2.2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Perda No.16	•
tahun 2004 tentang SITU	56
5.2.3. Kontribusi Retribusi SITU terhadap PAD	58
5.2.4. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan PAD dari	
Retribusi SITU	60
BAB VI KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	
6.1. Kesimpulan	62
6.2. Implikasi	63
DAFTAR PUSTAKA	

Ringkasan

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Gayo Lues yaitu "Terwujudnya masyarakat yang bermartabat, terbebas dari keterisolasian dan menurunkan angka kemiskinan berdasarkan Syariat Islam yang kaffah", telah dilakukan suatu kebijakan tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2004. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, disisi lain adalah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gayo Lues.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah tentang SITU, besarnya kontribusi dari retribusi SITU terhadap PAD, dan faktor yang mempenagruhi implemntasi Perda tentang SITU.

Dalam penelitian ini sample diambil secara purposive sampling dengan jumlah sample sebanyak 32 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, selain itu untuk mengetahui keberhasilan implementasi Peraturan Daerah digunakan metode skoring terhadap tiga faktor yang diukur yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata total skor adalah 1,99 yang berarti masuk dalam katagori kurang baik. Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 16 tahun 2004 adalah keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat wajib SITU, dan kualitas Sumber Daya Manusia yang kurang memadai.

Kontribusi retribusi SITU terhadap PAD Kabupaten Gayo Lues masih relative kecil yaitu 0,16 persen pada tahun 2003, 0,65 persen pada tahun 2004, dan 0,49 persen pada tahun 2005.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu meningkatkan peralatan yang mendukung, penyempurnaan data base potensi SITU, pelayanan satu atap, dan melakukan sosialisasi kepada masayarakat tentang SITU.

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Gayo Lues dengan Ibu Kota Blangkejeren merupakan sebuah kabupaten yang baru dimekarkan dari kabupaten induknya Aceh Tenggara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002. Secara administratif Kabupaten Gayo Lues terdiri dari sebelas kecamatan dengan jumlah penduduk lebih kurang 80.000 jiwa. Sedangkan letak perbatasan Gayo Lues yaitu batas sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Nagan Raya, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan Aceh Barat Daya, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh barat Daya.

Luas Kabupaten Gayo Lues adalah 571.967 ha (57,48 % dari luas Aceh Tenggara sebelum dimekarkan atau 9,97% dari luas Provinsi NAD). Dari luas Kabupaten Gayo Lues ini sebagian besar sekitar 441.953 ha (77,27 %) merupakan kawasan lindung dan hanya sekitar 130.032 ha (22,73 %) merupakan kawasan budidaya.

Sebagaimana kabaupaten baru yang lainnya, Kabupaten Gayo Lues juga sangat terbatas dari berbagai fasilitas, sarana, dan prasarana, sehingga kondisi sekarang sangat jauh tertinggal dibandingkan kabupaten induk dan kabupaten

UNIVERSITAS MEDAN AREA

lainnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Hal ini dapat dipahami karena Kabupaten Gayo Lues selain daerah baru juga merupakan salah satu Kabupaten yang terisolasi jauh dari Ibu Kota Provinsi NAD dan juga berada di kaki Gunung Bukit Barisan.

Dalam usianya yang sangat muda ini Kabupaten Gayo Lues juga terus bejuang untuk bangkit mengejar ketertinggalan sehingga dapat mengejar kemajuan dan setara dengan kabupaten lainnya yang telah berkembang. Dalam menjalankan pembangunan maka Kabupaten Gayo Lues juga berpedoman kepada Visi yaitu "Terwujudnya masyarakat yang bermartabat, terbebas dari keterisolasian dan menurunkan angka kemiskinan berdasarkan Syariat Islam yang Kaffah"

Pembangunan di Kabupaten Gayo Lues secara perlahan terus berjalan dengan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki, namun dalam perjalannya juga tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kendala sehingga berbagai potensi yang ada sangat sulit untuk dikembangkan dalam rangka merealisasikan visi yang telah ditetapkan.

Secara konseptual perkembangan Kabupaten Gayo Lues tentu harus ada titik pandang yang tepat sehingga dapat mendorong pertumbuhan daerah ini pada masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut maka pembangunan Kabupaten Gayo Lues dapat dikembangkan dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan secara makro dan mikro. Dalam pendekatan secara makro maka pembangunan didukung sebagai bagian dari wilayah yang luas baik secara regional maupun nasional. Sedangkan melalui

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra; 2003, Audit Sektor Publik, Jakarta: Visi Global Media.
- Dunn, William N; 2003, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widva.
- Indarwanto; 2001, Teori Administrasi Publik dan Birokrasi, Malang: Taroda.
- Islami, M. Irfan; 2000, Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jones, Charles O; 1996, Pengantar Kebijakan Publik, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nugroho D, Riant; 2003, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: PT. Eka Media Kompuntindo.
- Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, 2004, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Retribusi Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Blangkejeren: Bagian Hukum Setdakab.
- Republik Indonesia, 2000, Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: Bp. Pustaka Candra.
- Republik Indonesia, 2004, Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah, Jakarta: Bp. Pustaka Candra.
- Republik Indonesia, 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, Jakarta: Bp. Pustaka Candra.
- Republik Indonesia, 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, Jakarta: Bp. Pustaka Candra.
- Sugiyono; 2005, Metode Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabeta.
- Setiyono; 2004, Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Adminisatrasi, Semarang: Fisip Undip.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S; 2003, Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Lukman Offset.

- Tangkilisan, Hessel Nogi S; 2003, Evaluasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Balairung & Co.
- Thomas, Colin Coulson; 1996, Public Relations: Pedoman Praktis Untuk PR, Jakarta: Bumi Aksara.
- Utomo, Warsito, 2003, Dinamika Administrasi Publik: Analisis Empiris Seputar Isu Isu Kontemporer Dalam Administrasi Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta : Media Pressindo.

